PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

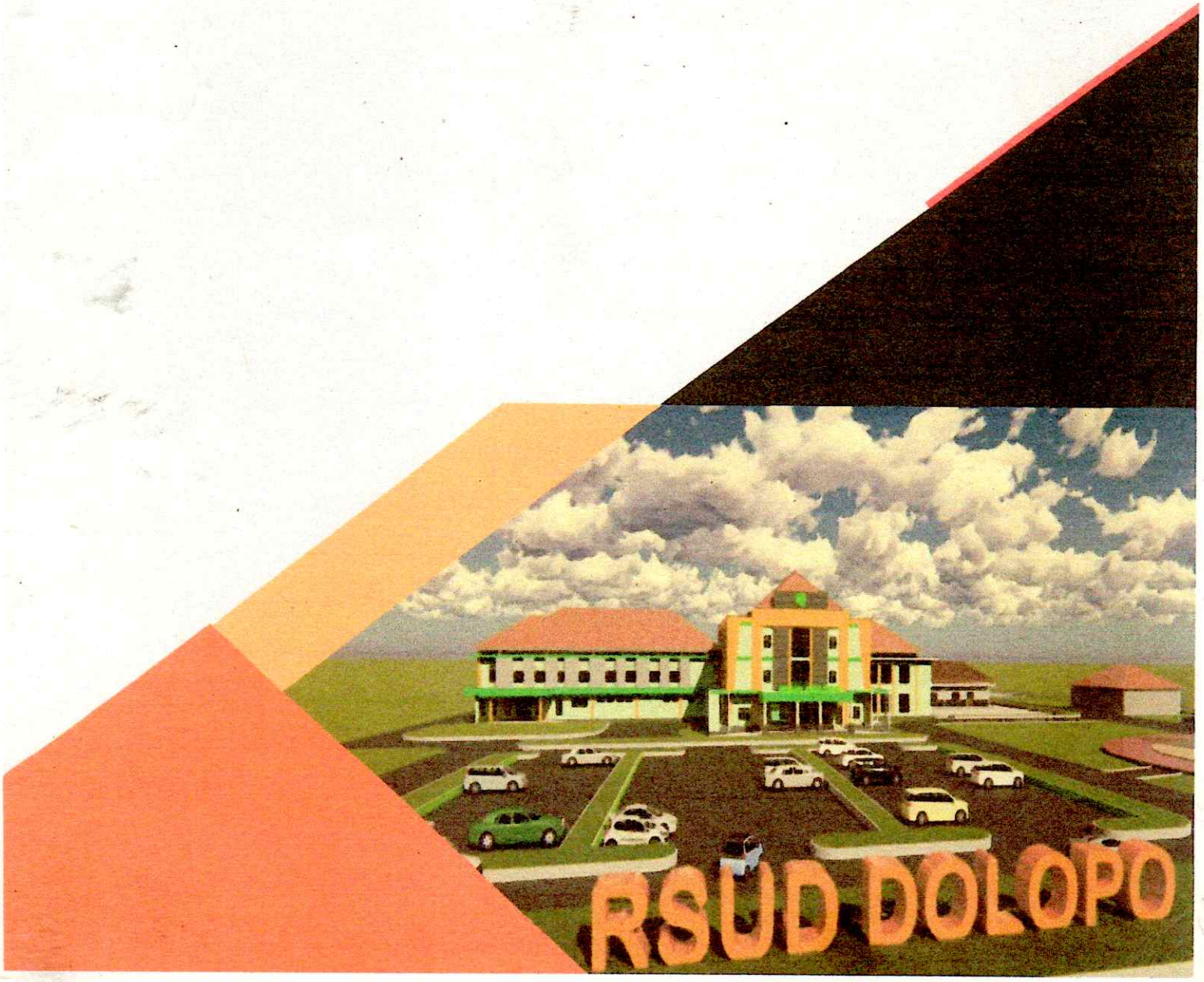

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Tahun 2018 – 2023, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Rencana strategis ini merupakan dokuman perencanaan yang tidak terlepas dari dokuman perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penyesuaian dengan situasi kondisi yaitu pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan yang memaksa penyesuaian di berbagai segi perencanaan diantaranya isu-isu strategis, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, target indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Perubahan rencana strategis 2018 – 2023 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 ini menjadikan arah proses pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo lebih terarah.

Madiun, Agustus 2021

Direktur RSUD Dolopo
Kabupaten Madiun

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RSUD DOLOPO

dr. Purnomo Hadi
NIP. 19750907 200902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.... 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 30

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi..... 31

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 32

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis..... 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 34

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 46

BAB VIII PENUTUP..... 48

Lampiran..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.....	10
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Dolopo.....	13
Tabel 1	Faktor Strategis Internal (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*/ IFAS).....	21
Tabel 2	Faktor Strategis Eksternal (*External Strategic Factor Analysis Summary*/ EFAS).....	24
Tabel 3	Matriks SWOT.....	26
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah...	35
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	37
Tabel T-C.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.....	41
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah memiliki Kepala Daerah periode 2018 – 2023 melalui pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Ketentuan tersebut sejalan dengan undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023 merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. RPJMD Kabupaten Madiun mengintegrasikan rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, serta masukkan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih, juga berpedoman pada RPJMD Propinsi Jawa Timur, serta Kementerian/Lembaga yang terkait. Sedangkan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, RSUD Dolopo mempunyai kewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2018 – 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD Dolopo selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini akan menjadi acuan

RSUD Dolopo untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Perjalanan RSUD Dolopo diawali pada tahun 1969 sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan menjadi *Public Health Center* di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah Madiun bagian Selatan. Selanjutnya tahun 2001 *Public Health Center* berkembang menjadi Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dengan hadirnya para Dokter Spesialis, guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bagi masyarakat salah satunya pelayanan rawat inap. Pada perkembangannya Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dikembangkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Plus Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun. Untuk mempersiapkan terbentuknya RSUD Dolopo sebagai rumah sakit dengan tipe C, telah dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan RSUD Dolopo yang terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dan RSUD Caruban Kabupaten Madiun.

Pada bulan Juli 2011 Bupati Madiun menerbitkan Surat Izin Nomor: 445/1214/402.102/2011 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun tertanggal 18 Juli 2011 dan pada tahun 2015 diperpanjang dengan Surat Izin Nomor : 445/648/402.102/2015 tertanggal 9 Maret 2015.

Di tahun 2012 RSUD Dolopo telah terakreditasi versi 2007 oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan di tahun 2018 RSUD Dolopo telah terakreditasi Versi SNARS Edisi 1 dengan status lulus Perdana. Sedangkan dalam bidang keuangan, RSUD Dolopo di tahun 2018 merintis pengelolaan keuangan menjadi BLUD dan tahun 2019 pengelolaan sudah sesuai BLUD.

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia sehingga arah kebijakan di *refocusing* untuk penanganan Covid-19 tersebut, dengan dasar salah satu faktor tersebut perlu dilakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diikuti dengan rencana strategis organisasi perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk menyusun Renstra RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
21. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Madiun;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2021,
29. Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dolopo:

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang Kesehatan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis RSUD Dolopo periode 2018-2023
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Dolopo Kabupaten Madiun .

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi RSUD Dolopo di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan .
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah .
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain
5. Menyamakan persepsi Visi dan Misi Kabupaten Madiun, RPJMD Kabupaten, RPJMD Propinsi, Visi Misi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga bisa merumuskan isu-isu strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan :

1.1 Latar belakang.
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

2.1 Tugas Pokok, Fungsi & Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah:

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati Madiun melalui Sekretaris Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, yaitu :

a. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo terdiri dari Direktur, Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang ;
b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi;
c. Masing-masing Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
    1. Bidang Pelayanan;
    2. Bidang Penunjang;
    3. Bidang Keuangan;

d. Bidang-Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Bidang Pelayanan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari :
   a) Seksi Pelayanan Medik;
   b) Seksi Pelayanan Keperawatan;
2. Bidang Penunjang;
   a) Seksi Penunjang Medik;
   b) Seksi Penunjang Non Medik;
3. Bidang Keuangan;
   a) Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana;
   b) Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

RSUD DOLOPO

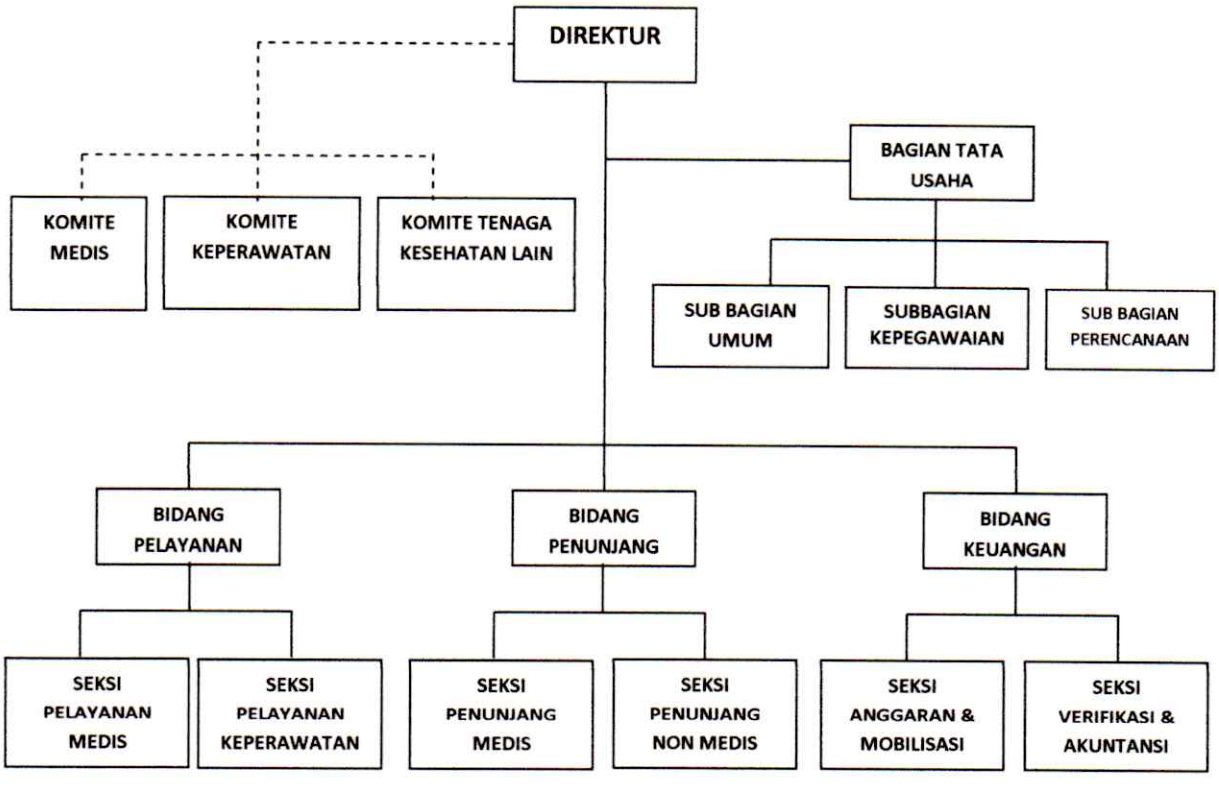

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

RSUD Dolopo dalam operasionalnya didukung oleh tenaga PNS 152 orang dan Non PNS 179 orang (data per 31 Desember 2020), dalam perkembangannya akan bertambah sesuai dengan penambahan pelayanan di RSUD Dolopo. Ketenagaan RSUD Dolopo per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan	
			PNS	Non PNS
A.	**Tenaga Medik Dasar**			
1.	Dokter Umum	15	6	9
2.	Dokter Gigi	3	3	0
B.	**Tenaga Medik Spesialis Dasar**			
1.	Dokter Spesialis Bedah	2	0	2
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1
3.	Dokter Spesialis Anak	1	1	0
4.	Dokter Spesialis Obgyn	1	1	0
C.	**Tenaga Spesialis Penunjang Medik**			
1.	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0
2.	Dokter Spesialis PK	1	1	0
3.	Dokter Spesialis Anaestesi	1	0	1
D.	**Tenaga Medik Spesialis Lain**			
1.	Dokter Spesialis Mata	1	1	0
2.	Dokter Spesialis Syaraf	1	1	0
3.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	1	0
4.	Dokter Spesilais Paru	1	1	0
5.	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	0
E.	**Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain**			
1.	Perawat	101	55	46
2.	Bidan	37	15	22
3.	Apoteker	4	3	1
6.	Gizi	4	3	1

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan	
			PNS	Non PNS
7.	Rekam Medik	4	4	0
8.	Radiologi	8	6	2
9.	Fisioterapi	3	3	0
10.	Teknik Medik	2	2	0
11.	Asisten Apoteker	13	4	9
12.	Analis Kesehatan	9	4	5
13.	Perawat Gigi	2	2	0
14.	Perawat Anaestesi	2	1	1
F.	**Tenaga Non Medis &Lainnya**			
1	Staf	110	31	79
	Total Keseluruhan	331	152	179

Sarana prasarana di RSUD Dolopo per Desember 2021 adalah :

1. Gedung Resepsionis
2. Gedung Rawat Jalan
3. Gedung IGD Terpadu
4. Gedung Bedah Sentral
5. Gedung ICU
6. Gedung Radiologi
7. Gedung Laboratorium
8. Gedung Farmasi
9. Gedung CSSD
10. Gedung Rawat Inap (Bangunan lama bekas Puskesmas)
11. Generator set kapasitas 500 kVa
12. Instalasi pengolahan air limbah
13. Incenerator
14. Bangunan Linen (Bangunan lama bekas Puskesmas)
15. Ruang Gizi (Bangunan lama bekas Puskesmas)
16. Gedung pemulasaraan jenazah
17. Mobil Ambulance 24 jam

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Dolopo disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dolopo
Kabupaten Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lain - SDGs	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	-	-	-	n/a	n/a	n/a	86,67	92,22	71,11	78,89	82,22	86,67	93,33	n/a	n/a	n/a	100	101,2

Periode rencana strategis 2013-2018 belum menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi target namun sudah dilakukan pengukuran setiap tahunnya. Pada periode rencana strategis 2018-2021 Standar Pelayanan Minimal menjadi indikator sasaran dan dari tahun 2016 tren realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal mengalami kenaikan, ini menunjukkan progres positif terhadap kinerja pelayanan RSUD Dolopo. Pada tahun 2020 meskipun sudah dalam masa pandemi Covid-19, RSUD Dolopo tetap berusaha untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal.

Indikator – indikator lain yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Instalasi IGD dan Instalasi Rawat Jalan

Uraian	Tahun								
	2018			2019			2020		
	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
Jumlah Kunjungan IGD	5081	4023	9104	7497	5316	11813	8364	6206	14570
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan									
- Kunjungan Baru	9758	13989	23747	14030	21864	35894	1555	2233	3788
- Kunjungan Lama	2013	3106	5119	2348	3673	6021	11210	15189	26399

Instalasi Rawat Inap

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah TT	97	97	103
Jumlah pasien masuk	6745	8228	6858
a. Laki	3029	3570	2906
b.Perempuan	3716	4658	3952
Jumlah pasien keluar hidup	6757	7991	6856
a. Laki	2963	3450	2905
b.Perempuan	3794	4541	3951
Jumlah pasien keluar mati	168	220	224
a.Laki	87	110	115
b.Perempuan	81	110	109
Pasien mati < 48 jam	113	161	155
a.Laki	58	84	77
b.Perempuan	55	77	78
Pasien mati ≥ 48 jam	55	59	69
a.Laki	29	26	38
b.Perempuan	26	33	31
Jumlah lama dirawat	19574	24126	18258
Jumlah hari perawatan	19595	31854	18237

Tingkat Efesiensi dan Mutu Pengelolaan Rumah Sakit

Uraian	Tahun			Standar
	2018	2019	2020	
BOR RS (termasuk BOR perinatologi) (%)	55,35	67,22	48,5	60-85
TOI (hari)	2,34	1,42	2,7	1-3
BTO (kali)	69,66	84,52	68,7	40-50
ALOS (hari)	2,9	2,90	2,6	6-9
GDR (‰)	2,43	2,68	31,6	≤ 45
a. Laki (‰)	1,25	1,69	19.3	
b. Perempuan (‰)	1,16	1,52	12.4	
NDR (‰)	0,79	1,36	9,7	<25
a. Laki (‰)	0,41	0,73	4,89	
b.Perempuan (‰)	0,38	0,63	4,94	

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Dolopo

Kabupaten Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,284,368,690	2,548,100,000	2,378,623,103	2,828,027,700	-	1,877,919,972	2,386,126,092	2,344,823,713	2,604,146,602		82.21%	93.64%	98.58%	92.08%		7.38%	11.51%
Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	3,000,000	3,000,000	2,484,600	-	4,998,000	2,994,000	1,998,000	2,484,000		99.96%	99.80%	66.60%	99.98%		-20.79%	-20.79%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	432,618,690	442,150,000	497,006,203	642,000,000	-	417,574,072	420,084,406	490,702,841	556,191,132		96.52%	95.01%	98.73%	86.63%		14.06%	10.03%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30,000,000	30,000,000	-	-	-	12,000,000	24,780,000				40.00%	82.60%				0.00%	106.50%
Penyediaan alat tulis kantor	65,000,000	137,150,000	160,000,000	162,689,850	-	64,829,500	136,733,350	159,988,620	162,689,850		99.74%	99.70%	99.99%	100.00%		35.77%	35.89%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,000,000	8,000,000	11,000,000	46,672,250	-	6,420,500	133,000	10,990,000	25,272,750		80.26%	1.66%	99.91%	54.15%		80.02%	57.89%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21,550,000	200,000,000	-	-	-	19,998,200	198,138,400				92.80%	99.07%				828.07%	890.78%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000	15,000,000	17,116,900	15,360,000	-	11,940,000	11,540,000	10,990,000	15,360,000		79.60%	76.93%	64.21%	100.00%		0.79%	8.76%
Penyediaan makanan dan minuman	237,000,000	310,000,000	256,000,000	355,000,000	-	231,922,500	303,909,311	243,221,449	347,989,700		97.86%	98.04%	95.01%	98.03%		14.42%	14.48%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83,400,000	35,000,000	62,000,000	75,439,000	-	83,244,700	34,981,125	61,993,403	75,439,000		99.81%	99.95%	99.99%	100.00%		-3.29%	-3.23%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	40,000,000	25,000,000	30,000,000	30,750,000	-	11,477,500	17,232,500	29,554,500	16,980,000		28.69%	68.93%	98.52%	55.15%		-8.39%	13.90%
Penyediaan Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1,274,800,000	1,342,800,000	1,317,500,000	1,447,200,000	-	927,770,000	1,235,600,000	1,305,700,000	1,351,595,100		72.78%	92.02%	99.10%	93.39%		4.32%	13.36%
Penyediaan jasa pengamanan	72,000,000	-	-	-	-	71,780,000					99.69%					0	0
Penyediaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	25,000,000	50,432,000	-			25,000,000	50,432,000				100.00%	100.00%		101.73%	101.73%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	862,850,000	334,879,000	440,929,761	422,163,502	-	411,492,036	325,554,334	429,697,404	368,946,957		47.69%	97.22%	97.45%	87.39%		-21.20%	-3.57%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	445,000,000	-	-	-	-	432,576,254					97.21%					0	0
Pengadaan peralatan kantor	243,850,000	94,879,000	198,239,797	126,526,902	-	239,330,000	93,802,000	197,346,300	125,905,950		98.15%	98.86%	99.55%	99.51%		-19.64%	-19.27%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	174,000,000	240,000,000	242,689,964	295,636,600	-	172,162,036	231,752,334	232,351,104	243,041,007		98.94%	96.56%	95.74%	82.21%		19.33%	12.18%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	165,520,000	42,000,000	-	-		161,698,000	40,562,500			-	97.69%	96.58%			-74.63%	-74.91%
Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	165,520,000	42,000,000	-	-		161,698,000	40,562,500			-	97.69%	96.58%			-74.63%	-74.91%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	82,500,000	78,500,000	90,000,000	77,900,000	-	31,650,000	80,899,582	87,700,000	72,865,000		38.36%	77.58%	97.44%	93.54%		-1.89%	32.04%
Pendidikan dan pelatihan formal	75,000,000	71,000,000	65,000,000	77,900,000	-	27,350,000	55,399,582	62,850,000	72,865,000		36.47%	78.03%	96.69%	93.54%		1.27%	38.63%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional	7,500,000	7,500,000	-	-	-	4,300,000	5,500,000				57.33%	73.33%				0.00%	27.91%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	25,000,000	-	-			24,850,000					99.40%			0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	298,950,000	204,400,000	-	100,000,000	-	172,398,000	162,002,050		69,650,000		57.67%	79.26%		69.65%		-42.16%	-36.44%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80,000,000	51,000,000	-	-	-	80,000,000	21,561,000				100.00%	42.28%				-36.25%	-73.05%
Pengendalian dan pelaporan keuangan rumah sakit	3,000,000	10,500,000	-	100,000,000	-	3,000,000	9,719,000		69,650,000		100.00%	92.56%		69.65%		477.35%	381.84%
Proses menuju BLUD	215,950,000	142,900,000	-	-	-	89,398,000	130,722,050				41.40%	91.48%				-33.83%	46.22%
PROGRAM PENATAAN PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1,833,481,310	2,720,000,000	-	-	-	1,578,560,000	2,628,341,000				86.10%	96.63%				48.35%	66.50%
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,833,481,310	2,720,000,000	-	-	-	1,578,560,000	2,628,341,000				86.10%	96.63%				48.35%	66.50%
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	24,348,034,591	25,999,562,186	19,007,750,576	27,932,554,352	5,900,000,000	17,005,965,771	20,685,666,641	18,479,204,558	26,741,545,346	5,495,665,005	69.85%	79.58%	97.22%	95.74%	93.15%	-29.84%	-24.60%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Pembangunan rumah sakit	2,257,766,100	4,445,000,000	3,805,557,000	5,823,771,978	5,900,000,000	2,241,331,000	4,275,159,300	3,750,103,221	5,518,127,433	5,495,665,005	99.27%	96.18%	98.54%	94.75%	93.15%	27.14%	25.13%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	211,350,000	866,124,544	-	612,605,381	-	203,060,000	862,502,901		611,211,622		96.08%	99.58%		99.77%		70.25%	73.49%
Pengadaan Mebelair rumah sakit	223,000,000	-	150,000,000	-	-	221,430,000		148,795,700			99.30%		99.20%			-32.74%	-32.80%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	507,381,000	200,000,000	242,280,000	440,530,840	-	491,895,000		242,138,600	334,239,017		96.95%	0.00%	99.94%	75.87%		-4.60%	-12.09%
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	5,714,620,000,000	6,136,493,500	8,141,377,000	7,952,260,542	-	5,377,947,421		7,962,357,132	8,077,318,820		0.09%	0.00%	97.80%	101.57%		-88.84%	14.52%
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	250,000,000	250,000,000	357,141,076	335,813,214	-	244,990,350	247,692,655	355,707,686	334,612,372		98.00%	99.08%	99.60%	99.64%		10.34%	10.95%
Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	6,000,000,000	4,745,659,000	6,109,945,500	9,066,872,000	-	5,501,340,000	140,492,000	5,819,484,000	8,438,601,571		91.69%	2.96%	95.25%	93.07%		14.75%	15.33%
Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (Penunjang DAK)	180,000,000	249,691,100	-	-	-	83,000,000	-				46.11%	0.00%				38.72%	-100.00%
Peningkatan derajat masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita asap rokok (Cukai)	2,129,375,600	-	-	-	-	2,129,375,600					100.00%					0	0
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	427,342,000	226,400,000	201,450,000	-	-	422,496,400	218,472,347	200,618,219			98.87%	96.50%	99.59%			-31.34%	-31.09%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Penyempurnaan Sistem Informasi manajemen rumah sakit	90,000,000	400,000,000	-	-	-	89,100,000	398,824,800				99.00%	99.71%				344.44%	347.61%
Penyusunan DED	50,000,000	-	-	-	-		-				0.00%	-				0	0
Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (Cukai)	6,201,918,162	5,000,000,000	-	-	-	5,495,499,820	4,856,166,800				88.61%	97.12%				-19.38%	-11.63%
Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (Sisa DAK)	105,281,729	498,660,000	-	-	-	102,300,000	471,724,600				97.17%	94.60%				373.64%	361.12%
Pengadaan rumah tangga rumah sakit (Sisa Pajak Rokok)	-	585,504,042	-	-	-		543,810,139					96.16%				0	0
Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (Pajak Rokok)	-	1,816,030,000	-	3,700,700,397	-		1,792,838,940		3,427,434,510			98.72%		92.62%		103.78%	91.17%
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit (Pajak Rokok)	-	600,000,000	-	-	-		571,484,500					95.25%				0	0
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	845,284,660	1,070,000,000	1,213,032,000	970,255,595	-	695,236,100	992,052,303	1,208,067,310	920,855,564		82.25%	92.72%	99.59%	94.91%		4.70%	9.82%
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	70,000,000	205,000,000	405,750,000	200,000,000	-	69,864,500	192,809,750	405,356,800	164,504,600		99.81%	93.96%	99.90%	82.25%		41.90%	33.04%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	83,600,000	85,000,000	62,120,000	28,047,000	-	69,614,900	55,017,750	60,816,910	24,670,550		83.27%	64.73%	97.90%	87.96%		-30.51%	-29.23%
Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	203,484,660	210,000,000	212,000,000	180,000,000	-	91,195,000	200,136,000	211,949,200	174,442,750		44.82%	95.30%	99.98%	96.91%		-4.01%	24.13%
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit	75,200,000	85,000,000	165,000,000	139,678,855	-	57,992,700	77,863,833	162,075,650	135,867,500		77.12%	91.60%	98.23%	97.27%		22.92%	32.82%
Pemeliharaan rutin/ berkala taman rumah sakit	25,000,000	35,000,000	20,000,000	30,000,000	-	24,737,500	31,041,500	19,995,000	29,412,000		98.95%	88.69%	99.98%	98.04%		6.27%	5.94%
Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan rumah sakit	388,000,000	450,000,000	348,162,000	392,529,740	-	381,831,500	435,383,470	347,873,750	391,958,164		98.41%	96.75%	99.92%	99.85%		0.39%	0.88%
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	120,100,000	218,000,000	148,000,000	358,594,660	-	63,081,400	166,241,500	141,969,960	338,973,487		52.52%	76.26%	95.93%	94.53%		44.00%	75.15%
Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	-	70,000,000	142,000,000	353,994,660	-		69,727,600	141,969,960	334,373,487			99.61%	99.98%	94.46%		124.88%	118.98%
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	5,100,000	10,000,000	6,000,000	4,600,000	-	4,909,100	4,500,000	-	4,600,000		96.26%	45.00%	0.00%	100.00%		-3.38%	-2.14%
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	115,000,000	138,000,000	-	-	-	63,081,400	92,013,900				54.85%	66.68%				20.00%	45.87%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT	7,417,530,000	7,050,307,500	11,202,229,960	13,173,662,886	47,049,899,908	4,600,440,938	6,905,144,494	10,817,214,099	11,935,973,335	44,754,061,707	62.02%	97.94%	96.56%	90.60%	95.12%	58.70%	76.61%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	241,000,000	182,000,000	120,300,760	55,835,730	-	240,950,000	180,497,000	120,217,002	53,277,001		99.98%	99.17%	99.93%	95.42%		-38.58%	-39.53%
Akreditasi Rumah Sakit	235,000,000	241,600,000	372,200,000	205,000,000	-	208,934,100	169,404,128	275,443,979	87,381,100		88.91%	70.12%	74.00%	42.62%		-4.45%	-25.22%
Pelayanan sunatan massal	95,000,000	84,000,000	39,679,200	23,068,500	-	29,004,000	35,502,800	39,679,200	23,068,500		30.53%	42.27%	100.00%	100.00%		-37.61%	-7.35%
Pelayanan penguburan mayat tidak dikenal	5,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
Operasional dan pengembangan rumah sakit	6,841,530,000	6,537,707,500	10,668,050,000	12,301,540,919	31,787,346,608	4,121,552,838	6,519,740,566	10,381,873,918	11,189,028,997	31,101,793,296	60.24%	99.73%	97.32%	90.96%	97.84%	46.82%	65.74%
Operasional dan pengembangan rumah sakit untuk penanganan Covid-19					15,262,553,300					13,652,268,411					89.45%	0	0
Operasional dan pengembangan rumah sakit (DAU)	-	-	-	583,217,737					583,217,737					100.00%		0	0
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	-	-	1,272,278,053	1,254,509,950	14,148,129,273			1,211,090,852	1,231,335,359	13,809,882,460			95.19%	98.15%	97.61%	233.47%	237.68%
Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan sosial kesehatan (Cukai)	-	-	1,272,278,053	1,254,509,950	14,148,129,273			1,211,090,852	1,231,335,359	13,809,882,460			95.19%	98.15%	97.61%	233.47%	237.68%
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (DAK)					9,644,039,528					8,401,012,552					87.11%	0	0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)					2,244,455,968					2,192,061,180					97.67%	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk penanganan Covid-19 (DAK)					7,399,583,560					6,208,951,372					83.91%	0	0
	38,093,099,251	40,389,268,686	35,794,843,453	47,117,668,646	76,742,068,710	32,472,029,391	34,473,725,996	34,760,330,396	44,284,291,650	72,460,621,724	85.24%	85.35%	97.11%	93.99%	94.42%	19.14%	22.22%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tantangan dan peluang Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo digunakan SWOT yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis.

a. Analisa Lingkungan Internal

Mencakup analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor-faktor internal yang relevan dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo misalnya dikaitkan dengan kondisi kinerja pelayanan yang diberikan, aspek manajerial dan SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kondisi kinerja keuangan. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel penilaian *strength* & *weakness* dari faktor-faktor tersebut secara kuantitatif dalam bentuk *scoring*.

Tabel 1
Faktor Strategis Internal (*Internal Strategic Factor Analysis Summary/IFAS*)

No	Uraian	Bobot	Skor		Bobot x Score
			Kekuatan	Kelemahan	
A	**PELAYANAN**				
1	Kelengkapan pelayanan yang diberikan sesuai preferensi pelanggan	0,7	1		0,7
2	Kualitas layanan sesuai standar	0,7	2		1,4
3	Daya tampung sesuai dengan kebutuhan pelanggan	0,7	2		1,4
4	Akses menuju rumah sakit	0,6	4		2,4
B	**SDM**				
5	Kecukupan jumlah SDM sesuai dengan standar pelayanan	0,7	3		2,1
6	Kualitas dan spesifikasi SDM sesuai dengan standar pelayanan	0,7		-1	-0,7
C	**SARANA DAN PRASARANA**				
7	Lahan yang tersedia cukup luas untuk pengembangan	0,6	3		1,8
8	Ketersediaan gedung dan bangunan sesuai dengan standar	0,7		-2	-1,4

9	Ketersediaan peralatan medik yang memenuhi standar	0,7		-2	-1,4
10	Kecukupan sistem informasi dan jaringan mendukung pelayanan dan manajemen	0,6	2		1,2
11	Ketersediaan pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan rumah sakit dan lingkungan	0,6	1		0,6
D	**SISTEM KEUANGAN**				
12	Kelancaran proses pencairan dana	0,7		-2	-1,4
13	Ketercukupan dana untuk operasional maupun pengembangan	0,7		-2	-1,4
No	**Uraian**	**Bobot**	**Skor**		**Bobot x Score**
			Kekuatan	**Kelemahan**	
14	Dukungan dari Dana APBD dan APBN	0,7	1		0,7
15	Tingkat kemandirian keuangan	0,6		-3	-1,8
		10			**4,2**

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk melihat situasi eksternal rumah sakit yang dapat memberikan peluang atau ancaman bagi keberadaan bisnis rumah sakit. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19

   Awal tahun 2020 pandemi Covid-19 terjadi juga di Indonesia, sejak 9 April 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/157/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya pandemi, pelayanan kesehatan di RSUD Dolopo mengalami banyak perubahan sehingga berdampak pada belanja dan pendapatan rumah sakit.

2. Pesaing industri sejenis

   Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dari segi persaingan memiliki banyak kompetitor dengan produk layanan yang sama, tarif yang setara dan kompetensi SDM yang setara dengan jarak kompetitor tidak jauh dan sangat

mudah dijangkau. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo memiliki keunggulan tempat yang strategis dibandingkan dengan kompetitornya.

No	Variabel	RSUD Dolopo					RSUD Kota Madiun					RS Aisyah Ponorogo				
		Buruk-Baik					Buruk-Baik					Buruk-Baik				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Fisik bangunan		2							4					4	
2	Reputasi			3						4					4	
3	Lokasi/akses					5			3						4	
4	Orientasi Konsumen				4					4					4	
5	Keahlian Manajemen			3						4					4	
6	Fleksibilitas Keuangan		2								5					5
7	Tarif Layanan			3						4					4	
8	Jaminan Kepastian			3						4					4	
9	Kualitas Produk			3						4					4	
10	Keandalan Pelayanan			3						4					4	
11	Variabilitas Produk			3						4					4	
12	Pelayanan Paripurna		2							4					4	
13	Promosi				4						5					5
14	Customer Service				4					4					4	
15	Kualitas SDM				4					4					4	
16	Kelengkapan Alat			3							5					5
		51					66					67				

3. Regulasi dan dukungan pemerintah

   Dalam analisis lingkungan eksternal banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya terkait dengan regulasi dan dukungan pemerintah. Pertama adanya isu dari kebijakan pemerintah (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) untuk menyediakan fasilitas layanan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa dan ketergantungan obat yang sampai saat ini belum ada. Kedua terkait dengan adanya kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam bentuk asuransi kesehatan masyarakat / BPJS yang masih pada tahap penyempurnaan sistem pelayanan terutama sistem pelayanan di rumah sakit.

4. Profil pelanggan

   Mengenai faktor eksternal dari profil pelanggan yang dapat menjadi peluang bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo antara lain terkait preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik). Selain hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mempunyai peluang karena wilayah rujukan yang luas dari berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga yang sudah terjalin ataupun yang masih akan dilakukan kerjasama.

   Faktor eksternal tersebut disajikan dalam bentuk tabel penilaian peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dikuantifikasi dalam bentuk *scoring*.

Tabel 2

Faktor Strategis Eksternal (*External Strategic Factor Analysis Summary/EFAS*)

NO	URAIAN	BOBOT	SKOR		Bobot x Skor
			Peluang	Ancaman	
A	PESAING INDUSTRI SEJENIS				
1	Rumah sakit swasta dan pemerintah yang memberikan pelayanan yang sama	1,20		-4	-4,8
2	Ketersediaan peluang rekrutmen tenaga medis (dokter spesialis) di wilayah Madiun dan sekitarnya	1,00		-2	-2
B	REGULASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH				
3	Fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan PPK BLUD	1,00	2		2
4	Penerapan Sistem JKN	1,00	2		2
5	Ketersediaan subsidi pemerintah (APBD dan APBN)	1,00	1		1
6	Pemberlakuan sistem rujukan berjenjang	0,80	3		2,4
7	Perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien	1,00		-3	-3
C	PROFIL PELANGGAN				
8	Preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik)	1,00	3		3
9	Wilayah rujukan yang luas dengan berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga	1,00	1		1
D	PERKEMBANGAN EKONOMI				
10	Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat terutama daerah Madiun	1,00	1		1
		10			**2,6**

Dari tabel penilaian (*scoring*) analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) ditentukanlah posisi strategis dalam bentuk grafik posisi kuadran. Grafik posisi menunjukkan posisi strategis yang akan menjadi dasar dalam menentukan faktor kunci keberhasilan strategis serta prioritas strategis yang akan dilakukan.

Posisi Strategis RSUD Dolopo

No	Posisi Strategis	Kisaran Nilai				
		MIN		0	MAX	
		-40	←======		======→	40
1	Analisis SW				4,2	
2	Analisis OT			2,6		

Keputusan Strategis : di kuadran I = **Agresif**

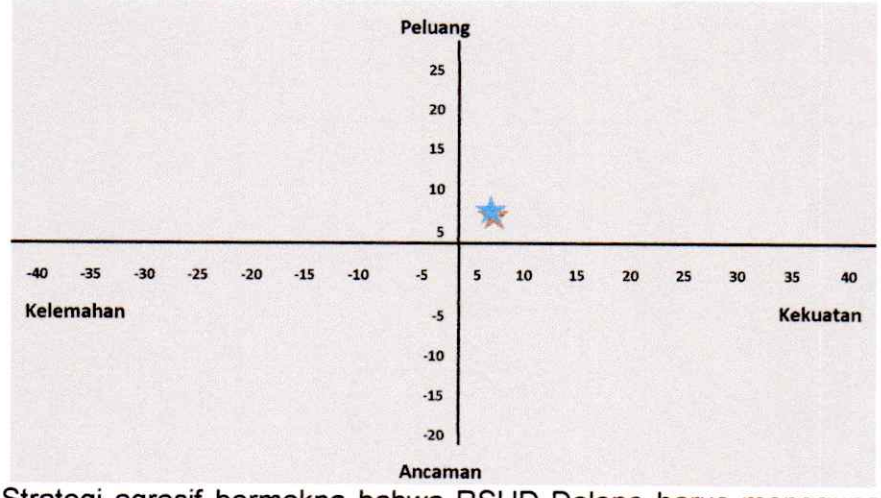

Strategi agresif bermakna bahwa RSUD Dolopo harus menggunakan strategi eksternal yang lebih kuat dengan :

1. Mengembangkan produk baru berikut investasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan yang diperlukan.
2. Bersaing secara mantap dan mengambil segmen pelanggan rumah sakit sejenis.
3. Memperkuat jaringan kerjasama untuk sistem rujukan
4. Menyelaraskan mindset sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk menuju era persaingan yang lebih terbuka dengan meningkatkan *Customer Value Mindset* (Peningkatan nilai bagi pelanggan)

Tabel 3
MATRIKS SWOT

ANALISIS IFAS / EFAS	PELUANG	ANCAMAN
	Fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Rumah sakit swasta dan pemerintah yang memberikan pelayanan yang sama
	Penerapan sistem JKN	Ketersediaan peluang rekrutmen tenaga medic (dokter spesialis) di wilayah Madiun dan sekitarnya
	Ketersediaan subsidi pemerintah (APBD dan APBN)	Perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien
	Penerapan sistem rujukan berjenjang oleh BPJS	
	Preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik)	
	Wilayah rujukan yang luas dengan berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga	
	Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat terutama wilayah Dolopo	
KEKUATAN	**KEY SUCCES FACTORS**	
Kelengkapan pelayanan yang diberikan sesuai preferensi pelanggan	1. Penerapan PPK BLUD	1. Penerapan PPK BLUD
Kualitas layanan sesuai standar (Akreditasi SNARS Edisi 1)	2. Pengembangan layanan spesialistik baru	2. Penguatan kerjasama dengan penjamin pasien
Daya tampung sesuai dengan kebutuhan pelanggan	3. Pembangunan gedung baru rumah sakit untuk pemenuhan standarisasi pelayanan	3. Penguatan strategi promosi rumah sakit
Akses menuju rumah sakit	4. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	
Kecukupan jumlah SDM sesuai dengan standar pelayanan		
Lahan yang tersedia cukup luas		
Kecukupan sistem informasi dan jaringan mendukung pelayanan dan manajemen		
Ketersediaan pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan rumah sakit dan lingkungan		
Dukungan dari dana APBD dan APBN		
KELEMAHAN	**KEY SUCCESS FACTORS**	
Kualitas dan spesifikasi SDM sesuai dengan standar pelayanan	1. Penerapan PPK BLUD	1. Penerapan PPK BLUD
Ketersediaan gedung dan bangunan sesuai dengan standar	2. Pembangunan gedung rumah sakit sesuai standar	2. Penguatan SIMRS untuk pengolahan data peningkatan mutu dan data klaim BPJS
Ketersediaan peralatan medis yang memenuhi standar	3. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	
Kelancaran proses pencairan dana	4. Pembukaan layanan spesialistik baru	
Ketercukupan dana untuk operasional maupun pengembangan		
Tingkat kemandirian keuangan		

Faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu program yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan. Berikut penjelasan SWOT dalam bentuk table matriks :

1. Pemantapan PPK BLUD

   Pada hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo perlu untuk memantapkan sistem tata kelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) untuk memudahkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan perekrutan pegawai. Selain itu, menyempurnakan dan menguatkan sistem dan prosedur dalam PPK BLUD.
2. Berkembangnya layanan spesialistik baru

   Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan tuntutan pemerintah terkait pemenuhan layanan dasar pihak rumah sakit perlu menambahkan layanan spesialistik baru, selain terkait dengan preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik juga dapat menjadikan rumah sakit membuka peluang cakupan layanan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo telah memiliki 12 layanan spesialis, dengan adanya kebutuhan dan dalam rangka penambahan layanan spesialis maka direncanakan pada tiga tahun ke depan ada penambahan dua layanan spesialis yaitu Spesialis Kulit dan Kelamin dan Spesialis Bedah Mulut.
3. Meningkatnya daya tampung pelayanan medis

   Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir, daya tampung rumah sakit perlu adanya penambahan dan pemisahan antara Pasien Covid-19 dan Pasien Non Covid-19 sehingga bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelayanan di RSUD Dolopo lengkap, aman dan nyaman.
4. Tersedianya fasilitas sarana prasarana pelayanan medik sesuai standar

   Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medis sesuai standar harus dipenuhi rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM

   Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan daya tampung rumah sakit harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi SDM rumah sakit.
6. Jalinan kerjasama dengan pihak penjamin (Asuransi)

   Kerjasama dengan pihak penjamin perlu dilakukan oleh rumah sakit, dengan bertambahnya jumlah kerjasama dengan penjamin dapat menjadikan rumah

sakit sebagai lembaga rujukan yang akan dikenal oleh lebih banyak pengguna layanan rumah sakit.

7. Menguatnya sistem rujukan berjenjang

   Penguatan sistem rujukan berjenjang ini dilakukan dengan pihak perujuk seperti Puskesmas, Klinik dan Dokter Keluarga, dengan menguatnya sistem rujukan berjenjang ini maka dapat meningkatkan jumlah pasien rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.

8. Meningkatnya promosi rumah sakit

   Selain faktor kunci yang telah disebutkan diatas, promosi/ publikasi layanan rumah sakit sangat penting dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo agar masyarakat tahu keunggulan dan kualitas layanan yang ada di rumah sakit, sehingga masyarakat lebih memilih Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dalam berobat.

9. Pengembangan SIMRS yang terintegrasi

   Di era sekarang SIMRS dibutuhkan untuk membantu kecepatan dan kualitas layanan rumah sakit maupun kecepatan akses data pelayanan dan data keuangan secara cepat dan real time. Sehingga data-data tersebut dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan dalam hal keuangan bisa mempercepat proses klaim terhadap BPJS maupun asuransi lain yang telah bekerjasama. Seiring berkembangnya teknologi, rekam medis pasien akan berbentuk elektronik yang akan memberikan efisiensi material dan waktu pelayanan.

   Pendaftaran online juga akan menjadi fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan di RSUD Dolopo tanpa banyak menghabiskan waktu antre di rumah sakit sehingga penularan penyakit di rumah sakit dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PRANGKAT DAERAH

3.1. Identiikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Dolopo menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit antara lain :

a. Faktor Internal
   1) Kualitas dan spesifikasi SDM belum optimal sesuai standar pelayanan;
   2) Ketersediaan gedung dan bangunan belum sesuai standar;
   3) Ketersediaan peralatan medis yang masih jauh dari standar;
   4) Kelancaran pencairan dana dan fleksibilitas anggaran;
   5) Ketercukupan anggaran untuk operasional maupun pengembangan;
   6) Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit yang masih rendah.
b. Faktor Ekternal
   1) Adanya pandemi Covid-19;
   2) Rumah sakit swasta dan pemerintah sekitar yang semakin berkembang dalam memberikan pelayanan;
   3) Kurang ketersedianya peluang rekrutmen tenaga medis (dokter spesialis) di wilayah Madiun;
   4) Perubahan-perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien (BPJS).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Dolopo. Visi dan Misi Bupati Madiun adalah *"Terwujudnya Kabupaten Madiun AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA dan BERAKHLAK"*.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
5. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal.

Menelaah kelima misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD Dolopo, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada Misi keempat. Pada Misi keempat terkait dengan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan diharapkan masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian/ pekerjaan.

Misi keempat "Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan" salah satu sasarannya adalah "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" dan RSUD Dolopo merumuskan tujuan "Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan" dengan indikator tujuan Indeks Kesehatan rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah meningkatnya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit dengan Indikator Sasarannya adalah Prosentase Standar Pelayanan Minimal rumah Sakit. Adapun tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo tersebut diharapkan dapat mempercepat tujuan dari visi Kabupaten Madiun, khususnya di misi ke empat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi Kementerian Kesehatan Indonesia **"Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan"**

Misi Kementerian Kesehatan Indonesia :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan ;
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Strategi

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional;
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2019- 2024 adalah sebagai berikut : **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong- Royong"**.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan kesehatan adalah Misi 2 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan

memperhatikan kelompok rentan. Hal itu tertuang dalam Nawabakti Satya : Bakti 3 : Jatim cerdas dan sehat, yaitu Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.

Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kementrian Kesehatan, Visi Pembangunan dan Visi Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Visi dan Misi Bupati terpilih, juga indikator-indikator yang terdapat pada *Sustainibility Development Goals* (SDGs) maka dirumuskan tujuan dan sasaran RSUD Dolopo dalam rangka mencapai misi ke empat Kabupaten Madiun yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang selaras dengan visi misi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tiga Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) :

1. Keterkaitan/holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak;
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang;
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

RSUD Dolopo telah memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya penataan lingkungan (UPL). Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 tahun 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029 menyebutkan di pasal 48 bahwa wilayah Dolopo masuk ke Sub Satuan Wilayah Pengembangan/SSWP-3 yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan dengan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industry kecil pengolah hasil,

pariwisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah agribisnis, pusat perdagangan dan jasa agribisnis, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo berperan dalam pemenuhan fasilitas umum khususnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung SSWP-3 menjadi kawasan agropolitan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk dapat bersaing dalam bidang jasa pelayanan kesehatan menuntut rumah sakit untuk selalu berbenah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa isu-isu strategis yang mengharuskan untuk melakukan langkah-langkah konstruktif. Adapun isu-isu tersebut adalah :

1. Adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kebijakan belanja dan pendapatan dalam rangka memenuhi pelayanan untuk pasien Covid-19 serta standar pelayanan yang semakin tinggi.
2. Adanya perubahan tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, cepat dan manusiawi.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo saat ini masih dalam klasifikasi sebagai Rumah Sakit Tipe C dan sedang berproses dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan agar sesuai dengan standar Rumah Sakit Tipe C.
4. Informasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan publik yang dijamin oleh undang-undang sekaligus sebagai kewajiban instansi pemerintah.
5. Bertambahnya badan usaha pemberi layanan kesehatan baik rumah sakit maupun klinik baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
6. Ada ancaman pasar bebas ASEAN (MEA) yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
7. Kebijakan pemerintah tentang JKN dan sistem rujukan yang mulai diterapkan tahun 2014, dimana dalam rangka ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS perlu adanya upaya pemenuhan persyaratan dan kualifikasi dari fasilitas pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai Visi Misi Bupati terpilih periode 2018-2023, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai RSUD Dolopo adalah **Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan** dengan indikator Indeks Kesehatan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka RSUD Dolopo menetapkan sasarannya adalah **Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit** sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Indikator dari sasaran tersebut adalah Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Target capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Dolopo disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini khususnya terkait pandemi Covid-19. Adanya pandemi menunda pemenuhan sarana dan prasarana di RSUD Dolopo karena kebijakan anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada rencana strategis 2018-2023 yang disusun pada awal periode direncanakan Standar Pelayanan Minimal dapat dicapai 100% pada tahun 2022, namun dengan tertundanya pemenuhan sarana prasarana maka target capaian Standar Pelayanan Minimal juga disesuaikan.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**TUJUAN** **Sebelum Perubahan** Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama
	Setelah Perubahan Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80
2	**SASARAN** Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	86.67%	92.22%	94.44%	96.67%	97.78%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang merupakan rumusan perencanaan komprehensip tentang bagaimana RSUD Dolopo Kabupaten Madiun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

- Penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit menjadi prioritas agar pandemi bisa segera berakhir
- Peningkatan kapasitas unit/ruang/instalasi dalam pembuatan perencanaan unit/ruang/instalasi masing-masing
- Penentuan indikator standar pelayanan minimal di tiap unit/ruang/instalasi
- Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di unit/ruang/instalasi dilakukan berkala
- Monitoring kepatuhan unit/ruang/instalasi terhadap regulasi dengan *tools* elemen penilaian akreditasi

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan serta sasaran. Kebijakan yang diambil adalah :

- Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan penanganan pandemi Covid-19
- Pemenuhan bangunan rumah sakit yang sesuai standar dan kemampuan anggaran
- Pemenuhan alat kesehatan dan prasarana lainnya sesuai dengan prioritas
- Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
- Pengembangan pelayanan rumah sakit dengan analisa preferensi kebutuhan masyarakat
- Pengajuan usulan anggaran bersumber APBN dan sumber lain yang sah untuk percepatan pemenuhan fisik bangunan dan alat kesehatan.
- Penyempurnaan pengelolaan pola keuangan BLUD dengan prinsip efektif dan efisien

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak			
MISI I : Meningkatnya Kesejahteraan yang Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	1. Penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit menjadi prioritas agar pandemi bisa segera berakhir 2. Peningkatan kapasitas unit/ruang/instalasi dalam pembuatan perencanaan unit/ruang/instalasi masing-masing 3. Penentuan indikator standar pelayanan minimal di tiap unit/ruang/instalasi 4. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di unit/ruang/instalasi dilakukan berkala 5. Monitoring kepatuhan unit/ruang/instalasi terhadap regulasi dengan tools elemen penilaian akreditasi	1. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan penanganan pandemi Covid-19 2. Pemenuhan bangunan Rumah Sakit yang sesuai standar dan kemampuan anggaran 3. Pemenuhan alat kesehatan dan prasarana lainnya sesuai dengan prioritas 4. Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan 5. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit dengan analisa preferensi kebutuhan masyarakat 6. Pengajuan usulan anggaran bersumber APBN dan sumber lain yang sah untuk percepatan pemenuhan fisik bangunan dan alat kesehatan 7. Pengelolaan pola keuangan BLUD dengan prinsip efektif dan efisien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan Program-Program dan kegiatannya. Mulai Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disesuaikan dengan peraturan tersebut. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran (2019), terdiri dari 10 kegiatan :
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan alat tulis kantor
   d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   f. Penyediaan makanan dan minuman
   g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
   i. Penyediaan jasa pendukung kinerja RSUD Dolopo (BLUD)
   j. Penyediaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2019), terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Pengadaan Peralatan Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2019), terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2019), terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Pengendalian dan pelaporan keuangan rumah sakit
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (2019), terdiri dari 6 kegiatan :
   a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

b. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
c. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
e. Pemeliharaan rutin/berkala taman rumah sakit
f. Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan rumah sakit

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (2019-2020), terdiri dari 7 kegiatan :
   a. Pembangunan rumah sakit
   b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
   c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit
   d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
   e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
   f. Pengadaan pencetakan administrasi rumah sakit
   g. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)
7. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit (2019-2020), terdiri dari 5 kegiatan :
   a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat
   b. Akreditasi Rumah Sakit
   c. Pelayanan Sunatan massal
   d. Pelayanan penguburan mayat tak dikenal
   e. Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan
8. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) (2019-2020), terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Peningkatan sarana dan prasarana (DAK)
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan (2019-2020), terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (Cukai)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2021-2023)
    a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
       (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
       (1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (2021-2023)
    a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
(2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(3) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana & Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana Program dan Kegiatan diatas disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatifnya. Program RSUD Dolopo merupakan program yang mendukung RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dimaksud diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

No	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN dan SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PADA TAHUN 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB	LOKASI
							2021		2022		2023		TARGET KINERJA	RP		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
I	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan				1 Indeks Kesehatan	0.78	0.79	99,647,564,508	0.8	82,864,400,105	0.8	102,100,000,000	0.8	284,611,964,613	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
II		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit			1 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang sesuai standar	93.33%	94.44%	99,647,564,508	96.67%	82,864,400,105	97.78%	102,100,000,000	97.78%	284,611,964,613	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
1			1.02.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.59	80.01	35,113,196,655	83.00	39,152,696,655	86.00	48,600,000,000	86.00	25,632,893,310	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
					2 Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	n/a	77.00%		88%		90.0%		90.00%			
					3 Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	100%	75.00%		100%		100%		100%			
					4 Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	87.50%	87.50%		87.50%		87.50%		87.50%			
					5 Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	86.96%	95.65%		97.83%		97.83%		97.83%			
					6 Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100%	96.88%		96.88%		100%		100%			

1.1			1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	8,493,196,655	100%	8,539,696,655	100%	8,600,000,000	100%	25,632,893,310	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
					2 Presentase pemenuhan insentif nakes ASN yang menangani covid-19	100%	100%		100%		100%		100%			
1.1.1			1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah ASN	155 orang	155 orang	8,493,196,655	160 orang	8,539,696,655	170 orang	8,600,000,000	170 orang	25,632,893,310	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
					2 Jumlah tenaga kesehatan ASN yang menangani Covid-19	75 orang	75 orang		100 orang		150 orang		150 orang			
1.2			1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Persentase capaian indikator SPM Subbagian Umum sesuai dengan standar	100%	100%	26,620,000,000	100%	30,613,000,000	100%	40,000,000,000	100%	97,233,000,000	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
					2 Persentase capaian indikator SPM Subbagian Kepegawaian sesuai dengan standar	66.67%	66.67%		66.67%		66.67%		66.67%			
					3 Persentase capaian indikator SPM Subbagian Perencanaan sesuai dengan standar	100%	100%		100%		100%		100%			
					4 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Pelayanan Medis sesuai dengan standar	95.54%	95.45%		100%		100%		100%			
					5 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar	92.00%	96.00%		96.00%		96.00%		96.00%			
					6 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Medis sesuai dengan standar	95.83%	95.83%		95.83%		100%		100%			
					7 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Non Medis sesuai	100%	100%		100%		100%		100%			

					dengan standar												
					8 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Anggaran dan Mobilisasi Dana sesuai dengan standar	66.67%	66.67%		100%		100%		100%			
					9 Persentase capaian indikator SPM Subbidang Verifikasi dan Akuntansi sesuai dengan standar	100%	100%		100%		100%		100%			
1.2.1			1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Jumlah indikator SPM Subbagian Umum sesuai dengan standar	3 indikator	3 indikator	26,620,000,000	4 indikator	30,613,000,000	4 indikator	40,000,000,000	4 indikator	97,233,000,000	RSUD Dolopo	
					2 Jumlah indikator SPM Subbagian Kepegawaian sesuai dengan standar	2 indikator	2 indikator		2 indikator		3 indikator		3 indikator			
					3 Jumlah indikator SPM Subbagian Perencanaan sesuai dengan standar	1 indikator	1 indikator		1 indikator		1 indikator		1 indikator			
					4 Jumlah indikator SPM Subbidang Pelayanan Medis sesuai dengan standar	19 indikator	19 indikator		20 indikator		21 indikator		21 indikator			
					5 Jumlah indikator SPM Subbidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar	20 indikator	20 indikator		22 indikator		23 indikator		23 indikator			
					6 Jumlah indikator SPM Subbidang Penunjang Medis sesuai dengan standar	20 indikator	20 indikator		22 indikator		23 indikator		23 indikator			
					7 Jumlah indikator SPM Subbidang Penunjang Non Medis sesuai dengan standar	5 indikator	5 indikator		6 indikator		6 indikator		6 indikator			
					8 Jumlah indikator SPM Subbidang Anggaran dan Mobilisasi Dana sesuai dengan standar	2 indikator	2 indikator		3 indikator		3 indikator		3 indikator			

					9 Jumlah indikator SPM Subbidang Verifikasi dan Akuntansi sesuai dengan standar	1 indikator	1 indikator		1 indikator		1 indikator		1 indikator			
2			**1.02.02**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	1 Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	75.00%	75.00%	17,534,367,853	100%	38,711,703,450	100%	48,500,000,000	100.00%	104,746,071,303	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
					2 Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	87.50%	87.50%		87.50%		87.50%		87.50%			
					3 Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	93.62%	95.65%		97.83%		97.83%		97.83%			
					4 Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	96.77%	96.88%		96.88%		100%		100.00%			
2.1			1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1 Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit yang sesuai standar	62.87%	64.00%	17,534,367,853	66.00%	38,711,703,450	68.00%	48,500,000,000	68.00%	104,746,071,303	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
2.1.1			1.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	1 Jumlah gedung rumah sakit yang diadakan	1 unit	3 unit	5,322,664,403	2 unit	32,711,703,450	2 unit	35,000,000,000	7 unit	72,034,367,853	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
2.1.2			1.02.02.2.01.12	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jumlah sarana penunjang pelayanan rumah sakit yang diadakan	2 unit	2 unit	8,711,703,450	1 unit	2,500,000,000	1 unit	3,500,000,000	1 unit	14,711,703,450	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
2.1.3			1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	58 unit	20 unit	3,500,000,000	10 unit	1,000,000,000	30 unit	5,000,000,000	30 unit	9,500,000,000	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
2.1.4			1.02.02.2.01.	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jumlah prasarana alat pendukung pelayanan yang diadakan	3 unit	1 unit	-	2 unit	2,500,000,000	4 unit	5,000,000,000	4 unit	7,500,000,000	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo

3			**1.02.03**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	1	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	93,829,505	100%	101,175,243	100%	108,704,624	100%	303,709,372	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
3.1			1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	1	Presentase pemenuhan insentif nakes non ASN yang menangani covid-19	100%	100%	93,829,505	100%	101,175,243	100%	108,704,624	100%	303,709,372	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo
3.1.1			1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1	Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani covid-19	75 orang	75 orang	93,829,505	100 orang	101,175,243	100 orang	108,704,624	100 orang	303,709,372	RSUD Dolopo	RSUD Dolopo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja RSUD Dolopo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai RSUD Dolopo untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Perumusan indikator kinerja RSUD Dolopo dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun. Tujuan ditetapkannya SPM bidang rumah sakit adalah :

a. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
b. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat;
c. Telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya.

Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Dolopo meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi :

a. Pelayanan gawat darurat;
b. Pelayanan rawat jalan;
c. Pelayanan rawat inap;
d. Pelayanan bedah;
e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
f. Pelayanan intensif;
g. Pelayanan radiologi;
h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
i. Pelayanan rehabilitasi medik;
j. Pelayanan farmasi;
k. Pelayanan gizi;
l. Pelayanan tranfusi darah;

m. Pelayanan keluarga miskin;

n. Pelayanan rekam medis;

o. Pengolahan limbah;

p. Pelayanan administrasi manajemen;

q. Pelayanan ambulance / kereta jenazah;

r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;

s. Pelayanan laundry;

t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Indikator Standar Pelayanan Minimal RSUD Dolopo adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai hasil yang dinginkan pada akhir tahun kelima dari RPJMD tahun 2018-2023, setiap tahunnya diharapkan ada peningkatan angka dari indikator kinerja RSUD Dolopo yang cukup bermakna.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tujuan Indeks Kesehatan	n/a	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80
2	Sasaran Presentase Capaian Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sesuai dengan standar	82.22%	86.67%	93.33%	94.44%	96.67%	97.78%	97.78%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Dolopo tahun 2018 – 2023 berisi tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023 diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pengembangan RSUD Dolopo dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 tahun. Perubahan Rencana Strategis RSUD Dolopo Tahun 2018-2023 dilakukan karena salah satu faktornya pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan belanja dan pendapatan di fokuskan untuk penanganan Covid-19 disamping untuk pemenuhan pengembangan rumah sakit.

Dimungkinkan akan terjadi perubahan lagi jika situasi dan kondisi tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir sebagaimana amanah dari UUD 1945.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

1 Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
2 Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan
3 Tujuan : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional
4 Tugas Pokok : Melaksanakan Penyusunan dan Penatalaksanaan Kebijakan Daerah yang Bersifat Spesifik di Bidang Pelayanan Kesehatan
5 Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ FORMULASI	REALISASI			TARGET KINERJA		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	(Indikator yang memenuhi SPM) / (Indikator SPM Rumah Sakit) x 100%	82,22%	86,67%	93,33%	94,44%	96,67%	97,78%

Arah Kebijakan Rencana Strategis RSUD Dolopo Tahun 2018 – 2023

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	ARAH KEBIJAKAN					Ket
			1	2	3	4	5	
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal	Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang dicapai	Meningkatkan layanan spesialis (THT) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga (Asuransi)	Meningkatkan layanan spesialis (jantung) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga (KSO Hemodialisis, Asuransi)	Meningkatkan layanan spesialis (bedah mulut) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga (KSO Hemodialisis, KSO Laboratorium, Asuransi)	Meningkatkan layanan spesialis (kulit kelamin) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga (KSO Hemodialisis, KSO Laboratorium, Asuransi)	Meningkatkan layanan spesialis (anestesi) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga (KSO Hemodialisis, KSO Laboratorium, Asuransi)	
			Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Jalan lingkungan, doorlop, sumber air/sumur)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Jalan lingkungan, doorlop, TPS sampah padat & B3, Saluran air hujan)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Jalan lingkungan, doorlop, Instalasi air bersih, tandon, hydran, jaringan telepon dan internet)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Jalan lingkungan, doorlop, pembangunan taman dan penghijauan rumah sakit)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Jalan lingkungan, doorlop, jaringan listrik dan pembangunan lahan parkir)	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	ARAH KEBIJAKAN					
			1	2	3	4	5	
			Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Gedung ICU, Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Alat kesehatan IGD)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Gedung Rawat Inap, Gedung Bersalin, IPAL, Alat Kesehatan radiologi, THT)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Gedung CSSD, Rawat Inap dan Gedung Rehab Medik)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Gedung Gizi, Gedung Rawat Inap, Gedung Hemodialisa)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Gedung IPS, Gedung Rawat Inap dan Kamar Jenazah)	
			Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Alat Kesehatan IGD,)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Alat kesehatan jantung, THT dan Radiologi)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Alat kesehatan ICU, laboratorium, radiologi)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Alat kesehatan bedah mulut, alat kesehatan kulit kelamin, alat CSSD)	Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (Alat kesehatan rawat inap)	